



**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

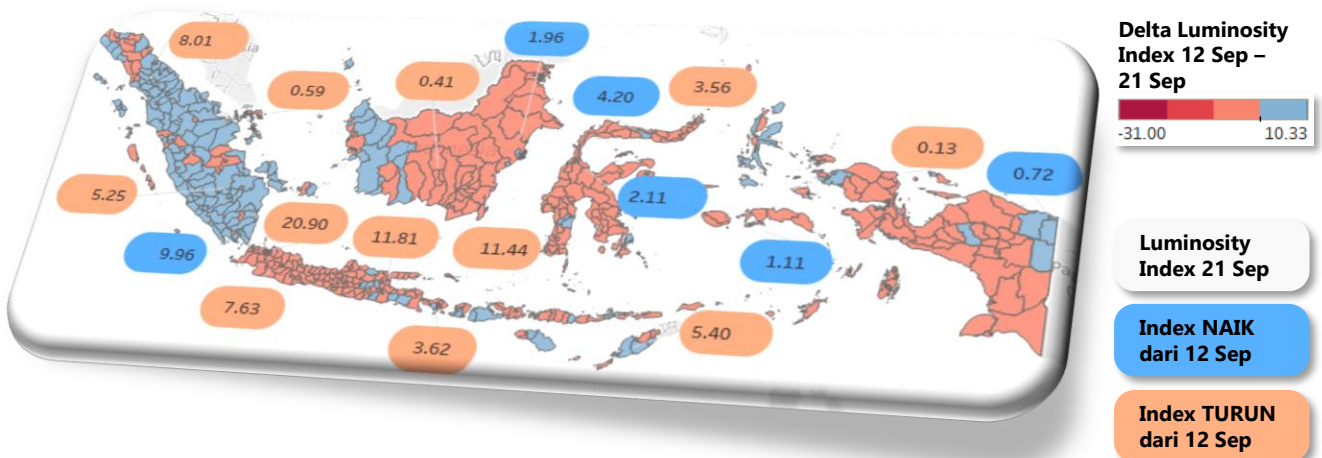
Periode 28 September
s.d. 9 Oktober 2020

Asterandhanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi • Subandono Sugiyanto • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring • Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa



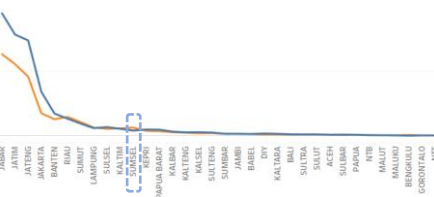
KINERJA PEREKONOMIAN

PERKEMBANGAN TINGKAT AKTIVITAS EKONOMI DI DAERAH

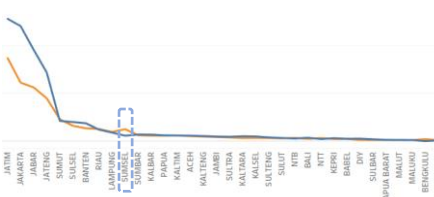


Berdasarkan nilai *luminosity index**, dalam dua minggu terakhir, **aktivitas perekonomian pada sebagian besar wilayah mengalami penurunan**, kecuali pada sebagian besar daerah di Sumatera. Pandemi yang masih tinggi di beberapa daerah dan adanya pembatasan aktivitas sosial berdampak pada penurunan *luminosity index*. **Penurunan tertinggi** dialami **Jakarta** (51,90 menjadi 20,90), **Surabaya** (22,20 menjadi 11,81), dan **Bandung** (17,77 menjadi 7,6). Namun demikian, masih terdapat beberapa daerah yang meningkatkan aktivitas ekonominya, tertinggi di Kota **Gorontalo** (1,74 menjadi 4,20), **Palu** (0,76 menjadi 2,11), dan **Bandar Lampung** (8,95 menjadi 9,96).

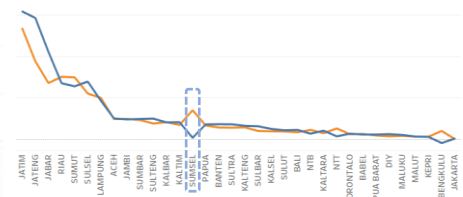
Industri Pengolahan



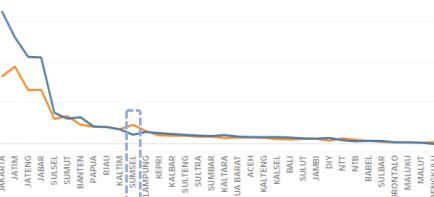
Perdagangan & Reparasi Kendaraan



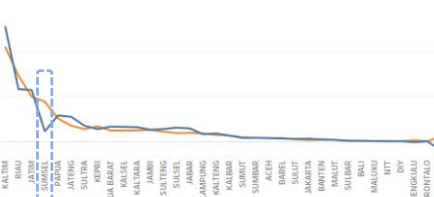
Pertanian, Kehutanan, Perikanan



Konstruksi



Pertambangan & Penggalian



Dalam 2 minggu terakhir, seluruh sektor mengalami **perlambatan aktivitas**, utamanya di **Pulau Jawa**. Namun, terdapat juga provinsi yang mengalami **peningkatan** pada kelima sektor utama, yaitu di **Sumsel**.

12 Sep 2020 (Blue line) | 21 Sep 2020 (Orange line)

INDEKS MOBILITAS NASIONAL DAN DAERAH

NASIONAL - 23 September 2020

Top 3 & Bottom 3 Chart



- NTT (0,03026)
- Gorontalo (0,01079)
- Maluku (0,00996)
- Susel (-0,03910)
- Kaltara (-0,04014)
- Sulut (-0,04517)

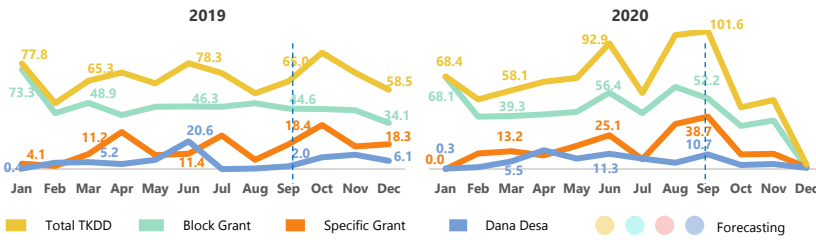
Linear dengan *luminosity index*, secara nasional, **Indeks Mobilitas juga mengalami penurunan** dalam dua minggu terakhir (dari **-0,055** menjadi **-0,092**). Hal ini menunjukkan menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Provinsi dengan **indeks tertinggi**, yaitu **NTT, Gorontalo, dan Maluku**, sedangkan **Indeks terendah** ada di **Sulut, Kaltara, dan Susel**.

*sumber: NASA dikutip Prospera, CSIS Indonesia

KINERJA FISKAL

PEMERINTAH PUSAT

TKDD Januari s.d. 25 September 2020 (YoY) (dalam triliun rupiah)



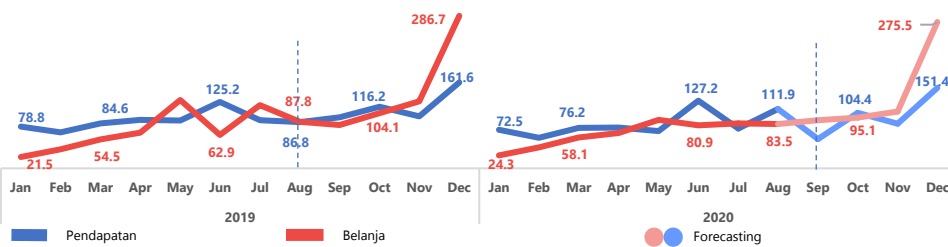
- Realisasi TKDD sebesar Rp587,4 T atau 76,9% dari pagu TKDD.
- Realisasi ini naik 6,59% dari periode yang sama th 2019 yang sebesar Rp551,1 T.
- Dalam 2 minggu terakhir, terdapat kenaikan realisasi Rp16,6 T atau 2,91%.
- BLT Desa telah disalurkan ke 98,9% desa sebesar Rp15,1 T kepada 7.970.652 KPM.
- Sampai akhir 2020, diperkirakan realisasi TKDD mencapai Rp758,7 T (99,3%).

PEMERINTAH DAERAH

APBD

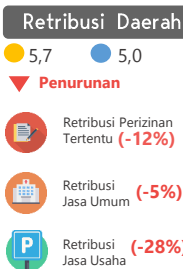
Januari s.d. Agustus 2020 (YoY)
(dalam triliun rupiah)

- Realisasi Pendapatan turun 6,58% dari Rp714,7 T menjadi Rp667,6 T (YoY) dengan penurunan terbesar dari PAD dan TKDD.
- Realisasi Belanja turun 8,55% dari Rp577,7 T menjadi Rp528,3 T (YoY), karena turunnya seluruh jenis belanja, kecuali Belanja Tak Terduga (BTT) yang naik dari Rp0,4 T menjadi Rp18,6 T (YoY).
- Realisasi pembiayaan netto mengalami penurunan 28,3% dari Rp53,8 T menjadi Rp38,6 T (YoY) yang sumber utamanya dari penggunaan SILPA TA sebelumnya.

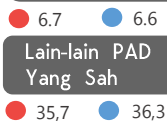


Sampai akhir 2020, diperkirakan terjadi defisit (pendapatan Rp1.062,6 T dan belanja Rp1.096,3 T). Belanja daerah yang ekspansif diperlukan sebagai *counter cyclical fiscal policy* untuk memulihkan perekonomian.

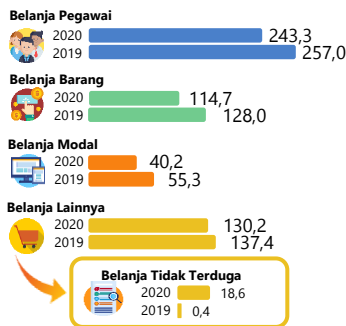
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



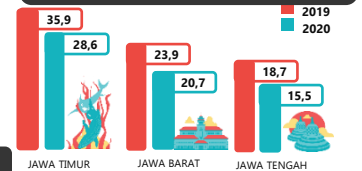
BELANJA DAERAH



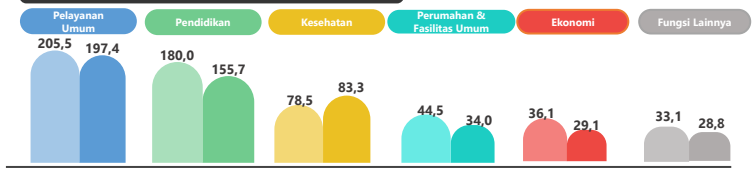
PEMBIAYAAN DAERAH



POSISI KAS DAERAH AGREGAT PROVINSI TERTINGGI



BELANJA BERDASARKAN FUNGSI



- Pembatasan aktivitas menyebabkan turunnya realisasi pajak yang bersifat konsumtif, seperti pajak hotel (-46%), pajak restoran (-37%), pajak hiburan (-58%), dan PBBKB (-18%)
- Realisasi belanja daerah masih bertumpu pada realisasi belanja pegawai dan barang/jasa sebesar 67,8% (Rp358,0 T).
- Realisasi BTT meningkat 44 kali lipat (YoY), menunjukkan upaya percepatan penanganan COVID-19, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi. Namun, realisasinya masih perlu diakselerasi, karena serapannya baru mencapai 36,5% dari total anggaran penanggulangan COVID-19.

KINERJA PENDIDIKAN

RASIO RUANG KELAS TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH

- Nilai ideal rombongan belajar (rombel) adalah 28 siswa per kelas, sedangkan ketersediaan kelas dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah secara **Nasional belum memenuhi** nilai ideal (**SD= 1:77, SMP= 1:176, SMA/SMK= 1:144**).
- Hal ini disebabkan kurangnya ruang kelas dan ruang kelas yang ada kondisinya tidak baik. Secara Nasional, kelas SD dalam kondisi baik sebanyak **27%**, kelas SMP kondisi baik sebanyak **35%**, kelas SMA dan SMK kondisi baik sebanyak **45%** dan **48%**.

SD – RASIO NASIONAL = 1 : 77



SMP – RASIO NASIONAL = 1 : 176



SMA/SMK – RASIO NASIONAL = 1 : 141

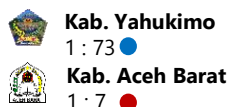


► Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud ● Semakin ideal ● Semakin tidak ideal

RASIO GURU (PNS+Non-PNS) DAN MURID PER JENJANG (Tahun 2019)

- Nilai ideal rasio guru-murid adalah 20 guru per murid. Secara **Nasional**, rasio guru dengan murid sudah mencapai level ideal (**SD= 1:17, SMP= 1:16, SMA= 1:16, SMK= 1:17**), **namun belum merata sebarannya**. Masih terdapat beberapa daerah yang belum pada nilai ideal. Pada level SD, terdapat 83 daerah, SMP terdapat 21 daerah, SMA terdapat 14 daerah, dan SMK terdapat 34 daerah.
- Persebaran guru masih terkonsentrasi di Jawa (**41,6%**) dan Sumatera (**27,9%**). Sedangkan di Kalimantan sebanyak **5,6%**, Sulawesi **9,6%**, dan Papua sebanyak **1%**.
- Secara Nasional, terdapat kekurangan **14.854** org guru di level SD, **137.002** org di level SMP, **33.202** org di level SMA, dan **41.293** org di level SMK.

SD – RASIO NASIONAL 1 : 17



SMP – RASIO NASIONAL 1 : 16



SMA – RASIO NASIONAL 1 : 16

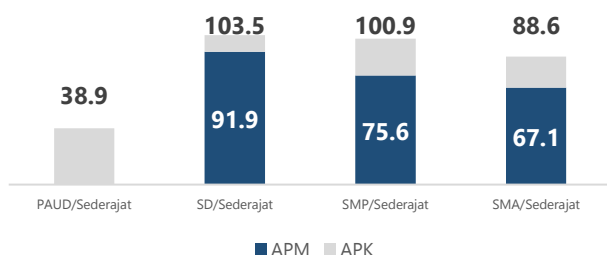


SMK – RASIO NASIONAL 1 : 17



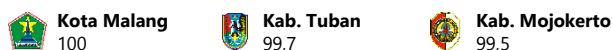
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

● **APK dan APM Nasional**
Tahun 2018/2019 (Persentase)

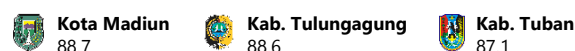


TOP 3 APM

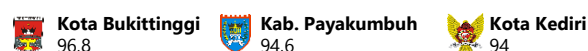
SEKOLAH DASAR



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

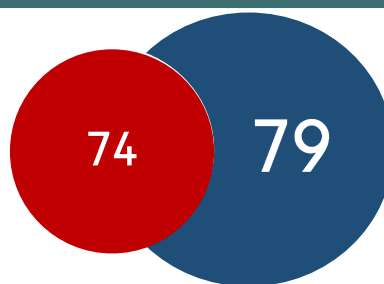


SEKOLAH MENENGAH ATAS



► Sumber: Data Verifikasi PDSPK, Juli 2019

PISA SCORE



Berdasarkan PISA Score tahun 2018, **skor Indonesia tergolong rendah (berada di urutan ke-74 dari 79 negara)**.

Kemampuan baca rendah (371, rata-rata OECD 487), serta skor matematika dan sains juga masih rendah (379 dan 396, rata-rata OECD 489).

Capaian siswa di Jakarta dan Yogyakarta mendekati nilai rata-rata OECD. DKI dan Yogyakarta meraih skor 410 dan 411 untuk baca, 416 dan 422 untuk matematika, serta 424 dan 434 untuk sains. Dengan total hasil seluruh wilayah Indonesia yang rendah, menunjukkan masih tingginya gap/jarak mutu pendidikan antarwilayah.

EDITORIAL

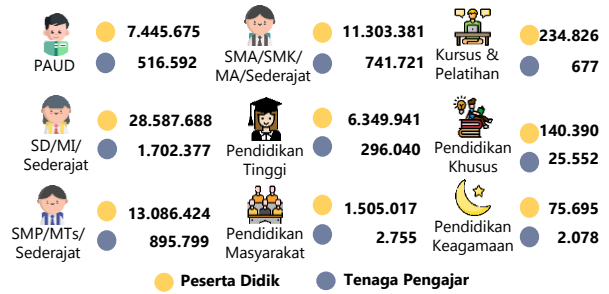
PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan di tengah adanya kebijakan pembatasan aktivitas. Para aktivis pendidikan perlu untuk mengubah metode pembelajaran, dari sebelumnya tatap muka menjadi tatap layar atau sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tentunya efektivitas sistem PJJ sangat tergantung pada berbagai hal.

PJJ menuntut perlunya perubahan cara guru mengajar agar siswa juga tetap fokus menerima materi di rumah. Sistem penilaian pun perlu disesuaikan, sebelumnya guru menilai siswa dari kedisiplinan, pemahaman, ketaatan pada aturan, dan kelakuan siswa selama di sekolah, berubah hanya menjadi penilaian tugas-tugas di rumah.

KESIAPAN GURU DAN MURID

Jumlah Peserta Didik dan Tenaga Pengajar yang melakukan PJJ

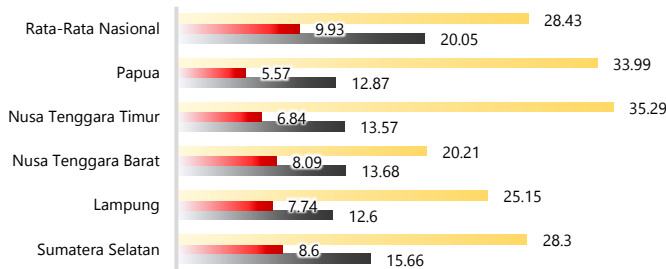


Sumber: Kemendikbud, dikutip databoks.katadata.co.id diakses pada tanggal 22 September 2020

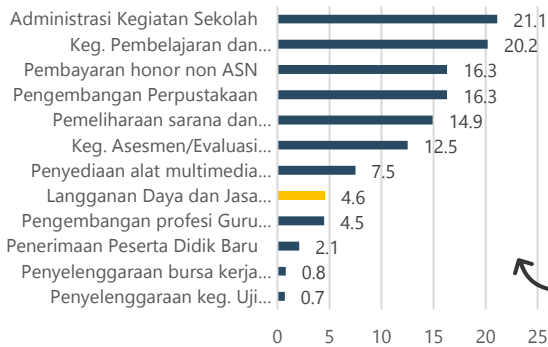
KESIAPAN SOFTWARE DAN HARDWARE

(Bottom Five)

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Komputer



Penggunaan Dana BOS Tahun 2019



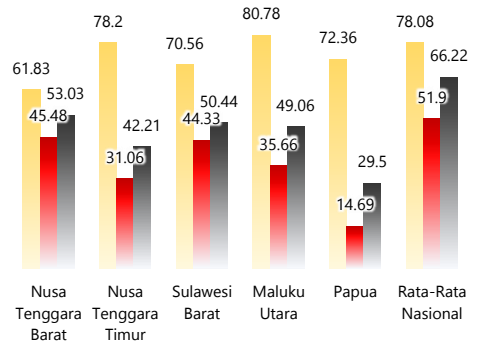
Sumber: Berdasarkan data Susenas, 2018

Legend: % Perkotaan (Yellow), % Perdesaan (Red), % Total (Grey)

“ Fasilitas PJJ bergantung pada ketersediaan perangkat dari masing-masing guru dan murid. Hal ini menjadi tantangan, dikarenakan berbedanya kondisi ekonomi di tiap keluarga untuk menyediakan perangkat PJJ (handphone, pc/laptop, aplikasi). Selain perangkat, kesiapan menggunakan dan mengakses perangkat tersebut juga beragam antarguru dan antarsiswa.

(Bottom Five)

Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir



“ Sistem PJJ juga menuntut tingginya biaya belanja kuota internet. Solusinya, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembiayaan langganan daya dan jasa, antara lain pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar.

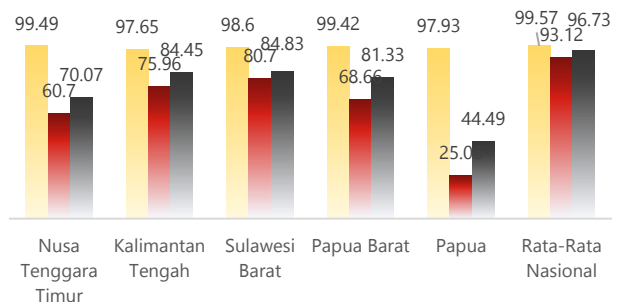
KESIAPAN INFRASTRUKTUR

Perlu diperhatikan kesiapan Kawasan Timur Indonesia dalam PJJ, karena masih terdapat gap akses penerangan listrik PLN yang tinggi, terutama di perdesaan.

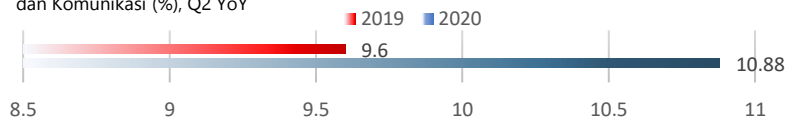
(Bottom Five)

Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Penerangan Listrik PLN

Legend: % Perkotaan (Yellow), % Perdesaan (Red), % Total (Grey)



Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi (%), Q2 YoY



Sumber: BPS-RI, Susenas 2009-2018

“ Meskipun banyak tantangan agar PJJ efektif, namun demikian PJJ juga memberikan peluang bagi pengembangan sektor informasi dan komunikasi. Disaat banyak sektor usaha terkontraksi, sektor telekomunikasi masih tumbuh positif pada kuartal II Tahun 2020 dipicu antara lain oleh meningkatnya belanja peningkatan trafik data internet dan jumlah pelanggan jasa internet. Sektor ini dapat menjadi pengungkit ekonomi nasional pada masa pandemi ini yang perlu dioptimalkan.

KABAR DAERAH

1

Pada tanggal 2 September 2020, Gubernur Jawa Timur memberikan sanksi administratif kepada Bupati Jember berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan. Hal ini dilakukan akibat terlambatnya pengesahan APBD TA 2020 di Kabupaten Jember. Keterlambatan ini diawali oleh *deadlock* dalam pembahasan KUA-PPAS dengan Badan Anggaran DPRD. Pada 25 Juni 2020, mediasi dilakukan oleh tim khusus dari Pemprov Jatim dengan menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD, namun mediasi tidak berhasil, sehingga mengakibatkan pemberian sanksi dari Gubernur.
<https://regional.kompas.com/>

4

Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan pihak swasta meluncurkan program inovasi di bidang digitalisasi parkir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh sekaligus mendukung gerakan nasional non-tunai. Program ini cukup berhasil di fase ujicoba pada salah satu ruas jalan di Kota Banda Aceh.
<https://aceh.antaraneews.com/>

6

Untuk mengantisipasi krisis pangan pada saat pandemi Covid-19, Bupati Maluku Tenggara mendorong masyarakat yang gemar berkebun untuk menanam berbagai tanaman pokok di lahan-lahan yang kosong. Selain mengatasi krisis pangan, berkebun secara mandiri juga dapat mengatasi krisis ekonomi masyarakat di saat pandemi.
<https://regional.kompas.com/>

2

Berdasarkan data rilis dari Kemendagri sampai dengan 9 September 2020 masih terdapat 21 daerah yang belum menyelesaikan transfer dana pilkada kepada KPU, dan terdapat 3 daerah yang jumlah transfer dana Pilkada masih dibawah 60%. Pilkada serentak akan dilakukan pada 9 Desember 2020 diikuti 309 kabupaten/kota dimana 45 daerah pelaksana Pilkada merupakan zona merah pandemi Covid-19.
<https://nasional.kompas.com/>



7

Pembangunan rumah sakit di Kota Makassar mengalami kendala, karena dinas kesehatan tidak memiliki unsur tim teknis dalam rangka pengelolaan dan pembangunan rumah sakit. Hal ini berbeda dengan dinas pendidikan yang telah memiliki unsur tim teknis pada struktur organisasi yaitu bidang sarana dan prasarana. Hal ini dapat menyebabkan pembangunan rumah sakit tidak bisa tercapai secara maksimal.
<https://makassar.sindonews.com/>

3

Petani di daerah mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Tingginya harga pupuk non-subsidi menyebabkan petani sangat mengandalkan pupuk bersubsidi. Harga pupuk bersubsidi sebesar Rp90.000 per karung sedangkan pupuk non-subsidi mencapai Rp160.000 per karung. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan pengurangan anggaran pengadaan pupuk subsidi dibandingkan tahun 2019 dari 8,8 juta ton menjadi 7,9 juta ton.
<https://money.kompas.com/>

5

Pemerintah Provinsi Jatim menginisiasi program pasar sembako online melalui Lumbung Pangan Jatim. Program ini bertujuan memberikan sembako dengan harga yang terjangkau dan diantar langsung ke konsumen tanpa biaya kirim. Program ini sangat mendukung protokol Kesehatan dan diwaktu yang bersamaan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi Covid-19 dengan biaya terjangkau.
<https://surabaya.kompas.com/>

8

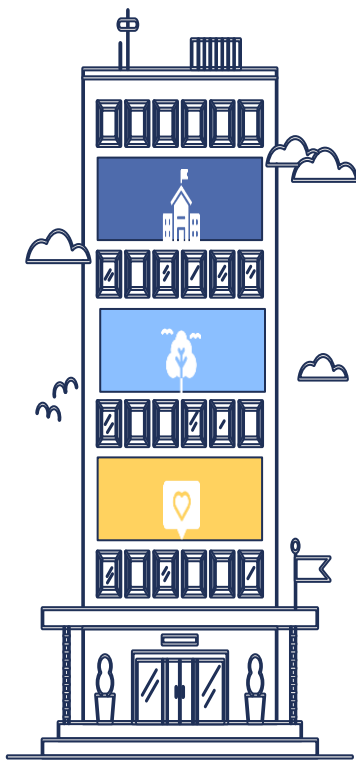
Masyarakat mengeluhkan terdapatnya biji plastik yang bercampur dengan beras di Program Beras bantuan pangan non-tunai (BPNT). Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur. Pemda Kabupaten Cianjur telah melaporkan kasus ini ke kepolisian dan mengumpulkan pemasok beras bantuan tersebut agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bantuan.
<https://regional.kompas.com/read/>

INOVASI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Kolaborasi Tiga Inovasi Kabupaten Deli Serdang sebagai Reaktualisasi Tri Sentra Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai inovasi dan terobosan dilakukan untuk memperkuat sektor pendidikan, yakni melalui kolaborasi tiga inovasi sekaligus: Program Cerdas, Opung Sari Basah Bang, dan Mesra Bertuah sebagai respon dari kurang memadainya kondisi sekolah-sekolah di Deli Serdang. Hal ini membawa Deli Serdang meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dan DID untuk kategori kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020.

► Inovasi Kabupaten Deli Serdang



Program Cerdas

merupakan model pengelolaan sekolah dengan *collaborative actions* dari tiga pihak: **pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, untuk melakukan perbaikan gedung sekolah rusak secara gotong royong**. Rehabilitasi gedung sekolah rusak dilaksanakan dengan dukungan dana partisipasi masyarakat. Hal ini berdampak positif pada perbaikan kondisi prasarana sekolah di Deli Serdang yang **meningkat tajam dari 30% (2005) menjadi 98,11% (2019) untuk tingkat SD dan dari 78,24% (2005) menjadi 98,41% (2019) untuk tingkat SMP**.

Program Opung Sari Basah Bang

merupakan model pengelolaan sekolah untuk mewujudkan **sekolah berwawasan lingkungan atau sekolah Adiwiyata dan Program Deli Serdang BERSERI (Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang, Indah) sejak tahun 2014**. Dalam program ini dilakukan **penanaman karakter wawasan lingkungan** melalui berbagai kegiatan seperti operasi pungut sampah, bank sampah sekolah, dan budaya kebersihan lainnya. Melalui Program Opung Sari Basah Bang ini telah terjadi peningkatan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) yang signifikan dari **hanya 114 sekolah (8,69%) pada tahun 2014 menjadi 728 (59,62%) sekolah pada tahun 2019**.

Program Mesra Bertuah

adalah model pengelolaan sekolah untuk mewujudkan **Sekolah Ramah Anak** melalui **kerja sama antara masyarakat, paguyuban orang tua, dan sekolah sejak 2017**. Program ini diklaim mampu menekan budaya kekerasan di sekolah di Deli Serdang, dari 34 angka kasus kekerasan terhadap anak di 2015 menjadi tidak ada kasus setelah pemberlakuan program. Melalui Program Mesra Bertuah terjadi **peningkatan sekolah ramah anak, dari 9 sekolah (0,82%) tahun 2016, menjadi 602 sekolah (49,30%) pada tahun 2019**.

Aksi kolaborasi di bidang pendidikan yang dikembangkan oleh Deli Serdang, sejatinya merupakan reaktualisasi gagasan Tri Sentra Pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menitikberatkan pentingnya pengembangan pendidikan dengan melibatkan tiga aspek yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat seperti paguyuban orang tua, komite sekolah, pengusaha, dan pemerintah, serta institusi kemasyarakatan lainnya.

Pada masa pandemi COVID-19, meskipun sulit, penyelenggaraan layanan pendidikan tetap dilakukan di Deli Serdang dengan menerapkan kombinasi metode pembelajaran daring, luring, dan home visit kelompok siswa. Pelaksanaan *home visit* merupakan upaya alternatif untuk membantu pemahaman para siswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan bauran kebijakan pembelajaran tersebut membutuhkan collaborative actions dari seluruh pihak termasuk orang tua dan masyarakat. **Upaya ini dimaksudkan agar kinerja pendidikan yang telah dicapai dapat terjaga dan ditngkatkan, antara lain indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang berada di angka 13,34 dan 10,08 (2019) atau lebih tinggi dari angka Nasional yang sebesar 12,95 dan 8,34.**

Semangat *continues improvements* dan aksi kolaborasi antarpihak di bidang pendidikan seperti yang dikembangkan oleh Kabupaten Deli Serdang dapat direplikasi oleh beberapa daerah sekitarnya yang masih perlu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pendidikan, seperti Kab. Muko-Muko, Musi Banyuasin, Labuhan Batu Selatan, dan Mandailing Natal.

KAJIAN PILIHAN

KERANGKA KONSEPTUAL PENGADAAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MELALUI KPBU DENGAN SKEMA BELANJA KETERSEDIAAN LAYANAN

Penyelenggaraan pendidikan secara merata membutuhkan ketersediaan layanan yang terstandar, berkualitas, konsisten dan berkesinambungan. Namun, saat ini sarana prasarana pendidikan masih banyak yang belum memenuhi standar baik, secara kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan fiskal sering menjadi alasan utama tidak terpenuhinya standar tersebut. Untuk itu, diperlukan terobosan baru bagi daerah dalam penggunaan alternatif skema pembiayaan untuk pendanaan layanan di sektor pendidikan, salah satunya melalui skema KPBU. Hingga saat ini belum satupun daerah yang telah menerapkan skema KPBU untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan konsep dan rumusan skema KPBU dengan metode pengembalian *Availability Payment* (AP) pada sektor pendidikan, sehingga skema tersebut dapat dilakukan oleh Pemda. Hal ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan *content analysis* terhadap kebijakan dan regulasi pemerintah.

Bagaimana daerah dapat menerapkan skema KPBU dengan pendekatan *Availability Payment* di sektor pendidikan? Hasil dari studi literatur dan konten analisis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya skema KPBU juga membutuhkan prosedur, aturan, dan pedoman yang jelas agar semua pihak dapat berperan optimal dan dapat menghindari adanya pemborosan maupun potensi *fraud*. Oleh karena itu, penanggungjawab utama pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU ini adalah Pemda, sehingga skemanya melalui KPDBU. Inisiatif dapat berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemda namun kepemimpinan Pemda sebagai penanggung jawab proyek memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPDBU.

Untuk mengakomodir inisiatif yang datang dari Pemerintah Pusat, sekaligus mengatasi minimnya kapasitas fiskal daerah, pembayaran layanan dapat dilaksanakan dengan skema AP dengan sumber dana yang berasal dari DAK. Dana transfer ini merupakan dana yang penggunaannya mengikuti berbagai aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga untuk saat ini akan menjadi lebih mudah jika Pemerintah Pusat yang memiliki inisiatif terimplementasinya skema KPDBU, meskipun eksekusinya nanti di daerah. Melalui skema ini Pemda sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan dapat memastikan ketersediaan layanan pendidikan dan melakukan pembayaran sesuai pemenuhan layanan yang diberikan Badan Usaha. Hal ini dapat mendorong efisiensi belanja pemerintah, karena pembayaran hanya dilakukan sesuai layanan yang dapat disediakan oleh Badan Usaha berdasarkan capaian indikator kinerja yang tertuang di dalam kontrak.

► Existing DAK dan KPBU di Daerah

1. DAK Fisik Air Minum dan KPBU dalam Proyek SPAM Umbulan

Dalam proyek umbulan ini, DAK Fisik Air Minum diberikan kepada Kab. Pasuruan untuk membangun sambungan air dari PDAM ke rumah (SR). Dalam skema pembiayaan ini, DAK Fisik menjadi salah satu dukungan pemerintah agar skema KPBU dapat berjalan di proyek Umbulan ini.

2. DAK BLPS dan Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik

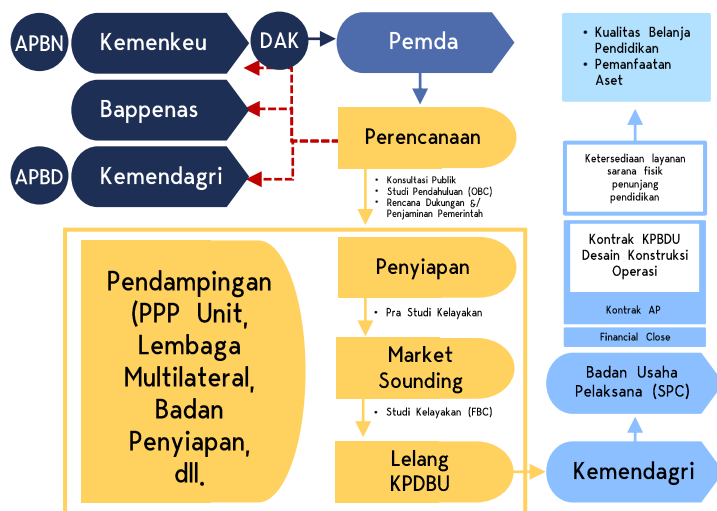
Dalam PSEL, DAK BLPS akan diberikan sebagai dukungan pemerintah atas layanan operasional pengelolaan sampah (*tipping fee*) yang dilakukan oleh Badan Usaha. Namun demikian, mengingat sifatnya yang tahunan (bukan *multiyear*), DAK BLPS yang sudah berjalan baru diberikan kepada proyek yang dikelola oleh BUMD, untuk KPBU dalam prakteknya masih menjadi kendala, karena belum bisa memberikan *guarantee cash flow* setiap tahunnya.

Sehingga:

Penerapan KPBU skema AP untuk sektor pendidikan, dimana DAK diarahkan untuk AP perlu dilakukan kajian lanjutan agar regulasi DAK yang ada sekarang bisa memberikan garansi *cash flow* atas ketersediaan layanan sesuai dengan durasi kontrak.

Dengan demikian, di dalam penerapan KPDBU Skema AP, sinkronisasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat menjadi sangat penting mengingat DAK merupakan belanja dalam APBN yang kemudian ditransfer ke daerah dan menjadi komponen dalam APBD. Dalam pelaksanaan KPDBU, sejak tahapan perencanaan, Pemda sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kemungkinan penggunaan DAK untuk AP. Proses perencanaan, persiapan, market sounding, dan lelang KPDBU juga harus selaras dengan proses APBN terkait pengalokasian DAK. Keselarasan dan sinkronisasi juga dibutuhkan mengingat Pemerintah Pusat berwenang penuh atas manajemen pendidikan, meski pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

► Konsep Skema KPDBU dengan Mekanisme AP



Penulis: Lestari Kurniawati, Dian Handayani, Eko Nur Surachman